

# **IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA TUMIH TERHADAP JALAN DESA YANG RUSAK**

## ***IMPLEMENTATION OF TUMIH VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY FOR DAMAGED VILLAGE ROADS***

Gatot<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>,

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin. 19.81.0054

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin. NIDN1177048501

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin. NIDN1112058204

Email: lailaamelia491@gmail.com

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** implementasi, pemerintah, Desa Tumih

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Menjelaskan Penerapan Pertanggungjawab pemerintah Desa Tumih terhadap jalan yang rusak dan untuk mengetahui faktor-faktor kendala/halangan perbaikan jalan di Desa Tumih, yang membuat masyarakat sulit untuk beraktifitas sehari hari karna kondisi jalan yang berlubang-lubang dan rusak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian, yaitu Implementasi Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tumih terhadap jalan desa yang rusak, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Kondisi jalan yang rusak di Desa Tumih Kec. Wanaraya Kabupaten Barito Kuala membuat peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada (Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa), dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Desa. Kondisi jalan yang rusak di Desa Tumih tentunya memiliki hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan di Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala adalah faktor partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *implementation, government, Tumih Village*

*The aim of this thesis research is to explain the implementation of responsibility of the Tumih Village government for damaged roads and to determine the factors that hinder road repairs in Tumih Village, which make it difficult for the community to carry out daily activities due to the condition of the roads which are full of holes and damaged.*

*This type of research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Empirical research is used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives which always interact and relate in social aspects.*

*The data analysis used in this research is adapted to the study, namely the Implementation of Accountability of the Tumih Village Government for damaged village roads, which aims to describe current and valid problems based on data.*

*The conclusion of this thesis research is the condition of damaged roads in Tumih Village, Kec. Wanaraya, Barito Kuala Regency, creates the role of village heads in road infrastructure development. In the process of determining the development implementer, it is carried out by the village head based on existing regulations and guidelines (Law number 6 of 2014 concerning Villages), and in this determination process the village head has a very large role in determining the Village development implementer. The damaged road conditions in Tumih Village certainly have obstacles faced by the village head in carrying out road repairs in Tumih Village, Wanaraya District, Barito Kuala Regency, namely the participation of village officials in implementing development programs.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah,(1986) Kamus Hukum. Jakarta, Ghalia Indonesia,  
Mahfudz, S. Fiqih Khalista (2007) Sosial antara konsep dan implementasi. Surabaya  
Sugiono (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta  
Hardiatmo, H.C., (2015). Pemeliharaan Jalan Raya. Edisi Pertama, Gadjah Mada Universitisy Press, Yogyakarta.  
Abdul Wahab, Solichin. (2002) Analisis Kebijakan, Dari Formulasi K Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta  
Syafi'e, Inu Kencana,(2003). Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta  
Alwi, H. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta  
Makarao, S. d. (2011) Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta  
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,h.43  
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, h. 53  
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Dearah